PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v5i3.3406
Vol. 5, No. 3, November 2026

TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN: STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

Sahrail Robo[1*], Augrah Kurnia Wulandari[2] , Ilham[3] , Urbanus Doga[4]
[134]Ilmu Pemerintahan, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Papua Pegunungan, Indonesia
[2]Hukum, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Papua Pegunungan, Indonesia
email: sahrailrobo22@protonmail.com

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2026-11-02
Revised : 2026-11-17
Accepted : 2026-11-18

KEYWORDS
Transformation, Governance, Regional Government

KATA KUNCI
Transformasi, Tata Kelola Pemerintahan, Pemerintahan Daerah

ABSTRACT
The establishment of Papua Pegunungan Province has changed local government administration, particularly in Jayawijaya Regency, the provincial capital. This study analyzes local governance transformation, focusing on institutional adjustments, intergovernmental coordination, development policy alignment, public service effectiveness, and related challenges. The study employed a qualitative descriptive approach. Informants were selected purposively, and data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis followed the Miles, Huberman, and Saldaña model, comprising data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that governance transformation requires stronger institutional capacity, clear divisions of authority, coordination between provincial and regency governments, and synchronized development programs. Improving personnel competence, ensuring equitable public services, and adapting policies to local geographical and sociocultural conditions are also essential. The study concludes that successful local governance transformation depends on an adaptive, collaborative, transparent, and accountable governance system overall.

ABSTRAK
Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Jayawijaya sebagai ibu kota provinsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi tata kelola pemerintahan daerah pascapembentukan provinsi baru, meliputi penyesuaian kelembagaan, koordinasi antarpemerintahan, sinkronisasi kebijakan pembangunan, efektivitas pelayanan publik, dan tantangan yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dipilih secara purposif, sedangkan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi tata kelola memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, kejelasan pembagian kewenangan, koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten, serta sinkronisasi program pembangunan. Peningkatan kompetensi aparatur, pemerataan pelayanan publik, dan penyesuaian kebijakan dengan kondisi geografis serta sosial budaya masyarakat juga diperlukan. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi pemerintahan daerah bergantung pada tata kelola yang adaptif, kolaboratif, transparan, dan akuntabel.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat(Fresiliasari & Suhardjo, 2023, p. 400). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya (Satmoko & Sari, 2024, p. 149). Tata kelola pemerintahan daerah yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi administratif, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi antarpemerintahan, pengelolaan sumber daya, serta kemampuan merespons kebutuhan masyarakat(Sukma *et al*., 2023, p. 988). Oleh karena itu, perubahan struktur pemerintahan dan pembentukan daerah otonom baru menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten (Riyanti *et al*., 2024). Oleh sebab itu, kajian mengenai efektivitas penataan daerah otonom dan kapasitas aparatur pemerintah daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kebijakan desentralisasi benar-benar mampu mempercepat pelayanan publik dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia (Afandi *et al*., 2025; Far'ain, 2023, p. 9). Sejumlah kajian menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan daerah dan kemampuan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola kewenangan yang telah dilimpahkan (Suriadi *et al*., 2024). Oleh karena itu, tantangan utama dalam penguatan otonomi daerah tidak hanya terletak pada perluasan kewenangan, tetapi juga pada upaya memastikan bahwa kewenangan tersebut diiringi dengan peningkatan kapasitas fiskal dan politik agar pemerintah daerah mampu menerjemahkan karakteristik lokal ke dalam kebijakan yang tepat sasaran (Novianto *et al*., 2026, p. 887).

Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan merupakan bagian dari kebijakan pemekaran wilayah di Papua yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Provinsi ini mencakup delapan kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, Kabupaten Jayawijaya ditetapkan sebagai lokasi ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Pembentukan provinsi baru ini diharapkan dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan.

Sebagai kabupaten yang menjadi lokasi ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya memiliki posisi strategis dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan pemerintahan provinsi di wilayah Jayawijaya membawa perkembangan baru dalam hubungan kelembagaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kondisi tersebut menuntut adanya penyesuaian dalam pelaksanaan kewenangan, pembagian urusan pemerintahan, koordinasi program pembangunan, serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan sebagai daerah kabupaten, tetapi juga berada dalam lingkungan pemerintahan yang mengalami perkembangan kelembagaan setelah terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan. Situasi ini menjadikan Jayawijaya sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana perubahan struktur pemerintahan memengaruhi tata kelola pemerintahan daerah.

Transformasi tata kelola pemerintahan pasca pembentukan Provinsi Papua Pegunungan menjadi penting untuk dikaji karena pembentukan daerah otonom baru tidak hanya berkaitan dengan perubahan batas administratif, tetapi juga berhubungan dengan penataan sistem pemerintahan, hubungan antarlembaga, pembagian kewenangan, dan pengelolaan sumber daya pemerintahan(Sukma *et al*., 2023, p. 984). Dalam konteks ini, pemerintah kabupaten dituntut untuk mampu menyesuaikan mekanisme kerja kelembagaan agar tetap berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hasrul, 2017, p. 14). Hubungan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten juga perlu diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling mendukung berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing (Jenar, 2022, p. 30). Dengan demikian, keberhasilan transformasi pemerintahan tidak hanya dilihat dari terbentuknya struktur kelembagaan baru, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang terkoordinasi, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (MAULANA *et al*., 2025, p. 93). Dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kapasitas

kelembagaan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam menghadapi perubahan lingkungan pemerintahan setelah terbentuknya provinsi baru (Aminulloh *et al*., 2026). Penyesuaian kelembagaan berkaitan dengan kemampuan organisasi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, membangun koordinasi lintas pemerintahan, serta menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan arah kebijakan pemerintah provinsi. Selain itu, keberadaan dua tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, membutuhkan pola koordinasi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan program maupun ketidakjelasan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan (Ruhara, 2020). Oleh sebab itu, kapasitas kelembagaan dan efektivitas koordinasi menjadi aspek penting dalam melihat proses transformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya.

Selain aspek kelembagaan, transformasi pemerintahan daerah juga berkaitan dengan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya perlu membangun keselarasan program pembangunan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, terutama dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Kondisi geografis wilayah pegunungan dan karakteristik sosial budaya masyarakat Jayawijaya juga menjadi pertimbangan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan publikasi Kabupaten Jayawijaya Dalam Angka 2026, wilayah ini memiliki 40 distrik dan 332 desa/kelurahan berdasarkan data yang disajikan BPS. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan hingga tingkat wilayah yang lebih dekat dengan masyarakat. Keterbatasan kewenangan dan kapasitas aparatur di tingkat distrik menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan fungsi koordinatif tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada kajian di Kota Sorong yang menemukan bahwa distrik lebih dominan berperan sebagai unit administratif dan fasilitatif terbatas (Liauw, 2025).

Permasalahan lain yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana perubahan struktur pemerintahan dapat memberikan dampak terhadap efektivitas pelayanan publik dan responsivitas pemerintah daerah (Haning *et al*., 2014). Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan pada dasarnya diharapkan mampu mendekatkan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Namun, pencapaian tujuan tersebut membutuhkan dukungan tata kelola pemerintahan yang mampu menjamin kejelasan prosedur, koordinasi antarlembaga, ketersediaan sumber daya aparatur, serta pemerataan akses pelayanan (Wibawa, 2019, p. 218). Pemerintah Kabupaten Jayawijaya perlu memastikan bahwa perubahan kelembagaan pada tingkat provinsi tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan pelayanan publik pada tingkat kabupaten, distrik, maupun kampung. Dengan demikian, transformasi tata kelola pemerintahan perlu dilihat dari sejauh mana perubahan tersebut mampu memperkuat fungsi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Aneta *et al*., 2023, p. 226).

Dalam konteks tersebut, penting untuk memahami bahwa transformasi tata kelola pemerintahan daerah bukan sekadar proses penyesuaian administratif, melainkan perubahan dalam pola hubungan, mekanisme koordinasi, kapasitas kelembagaan, dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan (Redjo, 2009). Pemerintah Kabupaten Jayawijaya perlu mengembangkan pola tata kelola yang adaptif terhadap dinamika pemerintahan setelah terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini mencakup penguatan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah, sinkronisasi kebijakan pembangunan, serta penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Aspek-aspek tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa keberadaan provinsi baru dapat berjalan seiring dengan penguatan kapasitas pemerintahan kabupaten (Rais *et al*., 2024, p. 57).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pasca Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan: Studi pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana proses transformasi tata kelola pemerintahan daerah berlangsung setelah pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, khususnya dalam aspek penyesuaian kelembagaan, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, sinkronisasi kebijakan pembangunan, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam menyesuaikan tata kelola pemerintahan dengan perkembangan struktur pemerintahan yang baru.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya bidang Pemerintahan Daerah dan tata kelola pemerintahan dalam konteks pembentukan daerah otonom baru. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan koordinasi antarpemerintahan, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai transformasi tata kelola pemerintahan daerah pascapembentukan Provinsi Papua Pegunungan, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Fokus penelitian meliputi penyesuaian kelembagaan, koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, sinkronisasi kebijakan pembangunan, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses transformasi tata kelola pemerintahan daerah.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informan penelitian meliputi pejabat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, aparatur organisasi perangkat daerah (OPD), unsur pemerintah distrik, serta pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki pemahaman mengenai dinamika tata kelola pemerintahan daerah setelah pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai perubahan kelembagaan, pola koordinasi antarpemerintahan, pelaksanaan kebijakan pembangunan, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

Analisis data menggunakan model (Miles, Huberman A.M, and Saldana 2014), yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses transformasi, perubahan kelembagaan, pola koordinasi, sinkronisasi kebijakan pembangunan, serta tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Jayawijaya pascapembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Transformasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan membawa perubahan terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Jayawijaya yang ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Perubahan tersebut memberikan konsekuensi terhadap hubungan kelembagaan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, termasuk dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, serta penyelenggaraan program pembangunan. Dalam konteks ini, transformasi kelembagaan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa perubahan struktur pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan tidak mengganggu pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Transformasi kelembagaan tidak hanya dipahami sebagai perubahan struktur organisasi pemerintahan, tetapi juga mencakup penyesuaian sistem kerja, pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab setiap organisasi perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya perlu memastikan bahwa seluruh perangkat daerah mampu menjalankan kewenangannya secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, keberadaan pemerintah provinsi di wilayah yang sama membutuhkan kejelasan hubungan kerja agar pelaksanaan urusan pemerintahan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun ketidakjelasan tanggung jawab antarlembaga.

Dari perspektif administrasi publik, kapasitas kelembagaan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi pemerintahan dituntut memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten

Jayawijaya perlu memperkuat kapasitas organisasi perangkat daerah melalui peningkatan kompetensi aparatur, pembenahan mekanisme kerja, serta pengembangan sistem administrasi pemerintahan yang lebih efektif. Penyesuaian tersebut penting agar pemerintah kabupaten tetap mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri sekaligus membangun hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah provinsi.

Selain itu, posisi Kabupaten Jayawijaya sebagai ibu kota provinsi juga menuntut adanya kemampuan kelembagaan dalam mengelola dinamika pemerintahan yang semakin kompleks. Kehadiran berbagai instansi pemerintahan provinsi dapat meningkatkan kebutuhan koordinasi, pengelolaan administrasi, dan dukungan pelayanan pemerintahan. Kondisi ini membutuhkan penataan kelembagaan yang mampu mengakomodasi kebutuhan pemerintahan kabupaten tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah kabupaten juga perlu memperhatikan efektivitas pemanfaatan sumber daya aparatur dan fasilitas pemerintahan agar penyelenggaraan tugas masing-masing lembaga dapat berjalan secara proporsional.

Dengan demikian, transformasi kelembagaan harus diarahkan pada penguatan kapasitas organisasi, kejelasan kewenangan, peningkatan kompetensi aparatur, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Penyesuaian tersebut menjadi dasar penting dalam membangun sistem pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan struktur pemerintahan setelah terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan.

b. Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi

Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan setelah pembentukan daerah otonom baru. Keberadaan dua tingkatan pemerintahan dalam satu wilayah membutuhkan pola hubungan kerja yang jelas, terarah, dan berkesinambungan. Hal ini penting karena masing-masing pemerintah memiliki kewenangan, tanggung jawab, serta prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi diperlukan untuk menyelaraskan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Tanpa koordinasi yang baik, terdapat potensi terjadinya ketidaksinkronan program, perbedaan prioritas pembangunan, serta kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya pemerintahan. Oleh karena itu, hubungan kerja antara kedua pemerintahan perlu dibangun melalui komunikasi kelembagaan, forum koordinasi, konsultasi kebijakan, serta penyelarasan program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah.

Koordinasi tersebut juga memiliki keterkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tetap memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sedangkan pemerintah provinsi menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan tingkat provinsi. Kejelasan pembagian urusan tersebut menjadi dasar penting dalam membangun hubungan pemerintahan yang efektif. Dengan demikian, koordinasi tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan masing-masing daerah, melainkan memperkuat sinergi dalam mencapai tujuan pembangunan.

Di sisi lain, koordinasi antarpemerintahan juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu membangun kerja sama dalam mendukung penyediaan fasilitas pelayanan, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar. Hal ini menjadi penting mengingat Kabupaten Jayawijaya memiliki kondisi geografis wilayah pegunungan yang membutuhkan pendekatan pelayanan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan kondisi wilayah. Kerja sama tersebut juga diperlukan untuk memastikan bahwa program pemerintah tidak hanya berpusat pada kawasan perkotaan, tetapi dapat menjangkau masyarakat di berbagai distrik dan kampung.

Selain koordinasi dalam pelaksanaan program, diperlukan pula mekanisme komunikasi dan evaluasi secara berkala antara kedua tingkatan pemerintahan. Evaluasi bersama dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kebijakan, memperjelas tanggung jawab kelembagaan, serta memperbaiki mekanisme kerja yang belum berjalan optimal. Melalui komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan, hubungan pemerintah kabupaten dan provinsi diharapkan mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terintegrasi.

Dengan demikian, penguatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menjadi bagian penting

dari transformasi tata kelola pemerintahan daerah. Hubungan kelembagaan yang baik akan mendukung terciptanya keselarasan kebijakan, kejelasan pelaksanaan kewenangan, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mendorong pembangunan daerah.

c. Sinkronisasi Kebijakan dan Pembangunan Daerah

Sinkronisasi kebijakan pembangunan merupakan salah satu aspek penting dalam proses transformasi tata kelola pemerintahan daerah pasca pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Perubahan struktur pemerintahan membutuhkan penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dapat berjalan selaras dengan program pembangunan pemerintah kabupaten. Dalam konteks Kabupaten Jayawijaya, sinkronisasi tersebut menjadi penting karena kabupaten ini memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan sekaligus memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat di wilayahnya.

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya harus memperhatikan keterkaitan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Keselarasan tersebut diperlukan agar setiap program pembangunan memiliki arah dan sasaran yang jelas serta tidak berjalan secara terpisah. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya perlu menyesuaikan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan Provinsi Papua Pegunungan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal. Proses tersebut dapat dilakukan melalui penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan, koordinasi program antarlembaga, serta penguatan komunikasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa sektor pembangunan yang membutuhkan perhatian dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Sektor tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan potensi sumber daya lokal. Sektor-sektor tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membutuhkan perencanaan yang terintegrasi. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan konektivitas wilayah, tetapi juga mendukung akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.

Selain itu, karakteristik geografis dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Jayawijaya perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Kondisi wilayah pegunungan, keterbatasan aksesibilitas pada sejumlah wilayah, serta keberagaman kebutuhan masyarakat membutuhkan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat, pemerintah distrik, pemerintah kampung, dan lembaga adat. Pelibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sinkronisasi kebijakan juga berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya pemerintahan. Keselarasan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat membantu mengurangi potensi duplikasi kegiatan serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, diperlukan mekanisme koordinasi yang mampu memastikan bahwa setiap program pembangunan memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, sinkronisasi kebijakan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terarah, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

d. Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan transformasi tata kelola pemerintahan daerah. Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan diharapkan dapat memperkuat kapasitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Namun, pencapaian tujuan tersebut membutuhkan dukungan kelembagaan, sumber daya aparatur, sistem administrasi, dan koordinasi yang memadai antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Dalam konteks Kabupaten Jayawijaya, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari kemampuan organisasi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Hal tersebut membutuhkan sistem kerja yang jelas, prosedur pelayanan yang mudah dipahami, serta aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan demikian, perubahan struktur pemerintahan setelah pembentukan provinsi baru perlu diikuti dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan di tingkat kabupaten.

Aspek pelayanan publik juga menjadi perhatian penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya perlu terus ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi geografis Kabupaten Jayawijaya yang berada di wilayah pegunungan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan sistem pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan tetap memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan.

Selain itu, efektivitas pemerintahan juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam merespons berbagai kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dan merumuskan langkah penyelesaiannya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pengaduan masyarakat yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi pelayanan juga menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Penguatan pelayanan publik juga perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi pemerintahan. Penggunaan sistem informasi dapat membantu mempercepat pengelolaan data, mempermudah penyampaian informasi, serta meningkatkan transparansi pelayanan. Meskipun demikian, penerapan teknologi perlu disesuaikan dengan ketersediaan infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia di masing-masing wilayah. Hal ini penting agar digitalisasi pemerintahan tidak hanya berkembang di pusat kabupaten, tetapi juga dapat mendukung pelayanan pada tingkat distrik dan kampung.

Dengan demikian, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tidak cukup diukur dari keberadaan struktur organisasi atau pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga perlu dilihat dari kualitas hasil yang dirasakan masyarakat. Transformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, pemerataan akses, penguatan akuntabilitas, serta kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi penting agar pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten.

e. Tantangan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Transformasi tata kelola pemerintahan daerah pasca pembentukan Provinsi Papua Pegunungan merupakan proses yang membutuhkan penyesuaian secara bertahap. Perubahan struktur pemerintahan tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan apabila tidak didukung oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan mekanisme koordinasi yang memadai. Dalam konteks Kabupaten Jayawijaya, berbagai aspek tersebut menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.

Salah satu tantangan yang perlu diperhatikan adalah penyesuaian hubungan kelembagaan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Keberadaan pemerintahan provinsi yang berpusat di Kabupaten Jayawijaya membutuhkan kejelasan pembagian tugas dan kewenangan agar pelaksanaan urusan pemerintahan dapat berjalan secara optimal. Perbedaan kepentingan program, prioritas pembangunan, serta kebutuhan administratif antarlembaga berpotensi menimbulkan hambatan apabila tidak disertai mekanisme koordinasi yang baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi dan kerja sama kelembagaan untuk menciptakan hubungan pemerintahan yang harmonis.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan. Kualitas aparatur memiliki pengaruh penting terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, mengelola administrasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan lingkungan pemerintahan setelah pembentukan provinsi baru membutuhkan aparatur yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan kebijakan dan tuntutan penyelenggaraan

pemerintahan. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan kapasitas, dan pembinaan aparatur menjadi langkah penting untuk mendukung proses transformasi tersebut.

Selain kapasitas aparatur, kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur pada sejumlah wilayah juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jayawijaya. Karakteristik wilayah pegunungan dapat memengaruhi jangkauan pelayanan, mobilitas aparatur, distribusi program pembangunan, serta akses masyarakat terhadap fasilitas pemerintahan. Kondisi ini membutuhkan strategi pelayanan dan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran pemerintah distrik dan kampung agar penyelenggaraan pemerintahan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Tantangan lainnya adalah memastikan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Masyarakat adat memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya di Kabupaten Jayawijaya sehingga kebijakan pembangunan perlu memperhatikan nilai-nilai lokal dan mekanisme sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pemerintah daerah perlu membangun komunikasi dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat agar proses perumusan kebijakan dapat mempertimbangkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Pendekatan tersebut juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, tantangan transformasi pemerintahan juga berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pemanfaatan sumber daya pembangunan. Perubahan struktur pemerintahan membutuhkan perencanaan anggaran yang tepat agar pelaksanaan program pemerintah kabupaten tetap berjalan sesuai prioritas daerah. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat dilaksanakan secara jelas sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi penting untuk menghindari duplikasi program serta memastikan penggunaan sumber daya pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, transformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya membutuhkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada penyesuaian administratif, tetapi juga pada penguatan kapasitas pemerintahan secara menyeluruh. Pemerintah daerah perlu membangun koordinasi yang efektif, meningkatkan kualitas aparatur, memperkuat sistem pelayanan publik, serta mengembangkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Dengan demikian, tantangan yang muncul dalam proses pembentukan provinsi baru dapat dikelola melalui pendekatan kelembagaan dan kebijakan yang lebih adaptif.

Berdasarkan kelima aspek pembahasan tersebut, transformasi tata kelola pemerintahan daerah pasca pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dapat dipahami sebagai proses penyesuaian sistem pemerintahan yang melibatkan berbagai dimensi kelembagaan, koordinasi, kebijakan pembangunan, pelayanan publik, dan kapasitas sumber daya manusia. Perubahan tersebut membutuhkan kesiapan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam menyesuaikan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan struktur pemerintahan yang baru. Sebagai kabupaten yang menjadi lokasi ibu kota provinsi, Jayawijaya memiliki posisi strategis dalam mendukung hubungan pemerintahan antara tingkat provinsi dan kabupaten.

Transformasi pemerintahan juga menunjukkan pentingnya membangun tata kelola yang bersifat kolaboratif. Pemerintah kabupaten tidak dapat menjalankan seluruh agenda pembangunan secara terpisah dari pemerintah provinsi, melainkan membutuhkan hubungan kerja yang saling mendukung sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selain itu, keterlibatan pemerintah distrik, pemerintah kampung, dan masyarakat adat perlu diperkuat agar kebijakan pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dengan demikian, keberhasilan transformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya tidak hanya ditentukan oleh perubahan struktur pemerintahan setelah pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam membangun kelembagaan yang adaptif, koordinasi yang efektif, kebijakan pembangunan yang terintegrasi, serta pelayanan publik yang responsif. Penguatan berbagai aspek tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan membawa perubahan signifikan terhadap dinamika penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Jayawijaya yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan provinsi. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan kelembagaan, tetapi juga memengaruhi hubungan koordinasi, pembagian kewenangan, sinkronisasi kebijakan pembangunan, serta penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kabupaten. Transformasi tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Jayawijaya menuntut adanya penyesuaian kelembagaan yang mampu memperjelas tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing organisasi perangkat daerah. Selain itu, koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menjadi aspek penting dalam menciptakan sinergi penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sinkronisasi kebijakan pembangunan juga diperlukan agar program pemerintah provinsi dan kabupaten dapat berjalan secara terarah, terintegrasi, serta sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Di sisi lain, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik masih membutuhkan perhatian, terutama berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pemerataan akses pelayanan, ketersediaan infrastruktur, serta kondisi geografis wilayah pegunungan. Karakteristik sosial budaya masyarakat adat juga menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam setiap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, transformasi tata kelola pemerintahan daerah pascapembentukan Provinsi Papua Pegunungan merupakan proses yang membutuhkan penyesuaian secara menyeluruh dan berkelanjutan. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh terbentuknya struktur pemerintahan provinsi yang baru, tetapi juga oleh kemampuan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam membangun kelembagaan yang adaptif, memperkuat koordinasi antarpemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pembangunan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat..

4. Saran

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas aparatur dan memperkuat kelembagaan, serta membangun koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik, pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas perlu menjadi perhatian agar transformasi tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, informasi, serta bantuan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan dan pihak-pihak terkait yang telah meluangkan waktu serta memberikan kontribusi sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Papua Pegunungan.

5. Referensi

Afandi, M. R., Ardiansyah, & Kamdani. (2025). Otonomi Daerah sebuah Kajian Literature Review. Journal of Literature Review, 1(1), 211–217. https://doi.org/10.63822/e50m4s79

Aminulloh, M. J., Septiandika, V., & Maksin, M. (2026). Optimalisasi Kapasitas dan Kelembagaan Daerah dalam Menjawab Tantangan Pelayanan Publik Era Digital (Studi Kasus DPMPTSP Kota Probolinggo). Jurnal ISO Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora, 6(1), 10. https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3797

Aneta, Y., Prahara, S., Aneta, A., & Ahmad, J. (2023). Bureaucratic Transformation Optimizing Village Bureaucracy Transformation: Gorontalo, Indonesia. Policy & Governance Review, 7(3), 211. https://doi.org/10.30589/pgr.v7i3.775

Far'ain. (2023). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. In OSF Preprints (OSF Preprints). Center for Open Science. https://doi.org/10.31219/osf.io/wdtcy

Fresiliasari, O., & Suhardjo, Y. (2023). Interkoneksi Aplikasi Administrasi Perkantoran Dengan Aplikasi Pelayanan Perijinan Pemerintah Daerah. Solusi, 21(4), 398–412. https://doi.org/10.26623/slsi.v21i4.7749

Haning, M. T., Yunus, M. A. Prof. Dr. H. S., Tamba, L., & Nara, N. (2014). Desain Organisasi Pemerintah Kecamatan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik Di Kota Makassar. Hasanuddin University Repository. http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/11863

Hasrul, Moh. (2017). Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perspektif, 22(1), 1. https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i1.601

Jenar, S. (2022). Politik Hukum Pembentukan Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional. Justitia et Pax, 38(1). https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5066

Liauw, G. (2025). Perspektif Kewenangan Distrik di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(11), 4884–4895. https://doi.org/10.59141/japendi.v6i11.8774

Maulana, N. Y., Kesi, W., Kesi, W., & Dian, I. (2025). Kinerja Anggaran Memediasi Pengaruh Gcg Terhadap Efektifitas Pengelolaan Anggaran (Study Pada Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 18(1), 92–115. https://doi.org/10.26623/jreb.v18i1.12682

Miles, M. .., Huberman A.M, and Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA : Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Novianto, H. A., Mahardika, R., & Ramadhani, A. Z. F. (2026). Fiscal Decentralization and Institutional Legacy: Explaining Variations in Human Development Outcomes in Banyumas and Banjarnegara Regencies. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 11(3), 884–901. https://doi.org/10.36982/jpp.v11i3.7499

Rais, L., Halik, W., Purnomo, A., Ali, M., Mardliyah, U., Banggu, M., Salmawati, S., Ramli, U., & Wahid, B. (2024). Sosialisasi Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Melalui Pendidikan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Kabupaten Sorong. Abdimas Papua Journal of Community Service, 6(2), 56–64. https://doi.org/10.33506/pjcs.v6i2.3504

Redjo, S. I. (2009). Transformasi Manajemen Pemerintahan: Kasus Di Pemerintah Kota Bandung. Sosiohumaniora, 11(3), 25. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v11i3.5423

Riyanti, N., Satipsi, E., Yusuf, M., & Salam, R. (2024). Kajian Pengembangan Wilayah : Respon Kebijakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Kalimantan Tengah. Journal of Economic Bussines and Accounting (COSTING), 7(6), 746–753. https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.14843

Ruhara, A. (2020). MekanismeKoordinasi Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Dekonsentrasi (Koordinasi Kewilayahan) Di Prpinsi. SHILAP Revista de lepidopterología, 4(3), 27–38. https://doi.org/10.31845/jwk.v4i3.579

Satmoko, R. A., & Sari, A. G. P. (2024). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Tanah Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 4(2), 148–159. https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4665

Sukma, D., Sumartono, S., Saleh, C., Amin, F., & Riyadi, B. S. (2023). Implementation of Local Government and Decentralization within City: A Qualitative Study in Jakarta, Indonesia. International Journal of Membrane Science and Technology, 10(3), 984–996. https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1646

Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. I. (2024). Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Menara Ilmu, 18(1). https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869

Wibawa, K. C. S. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Administrative Law & Governance Journal, 2(2), 218–234. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234

© 2026 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).